

Implementasi Pengembangan Persenjataan Angkatan Laut Indonesia

Lukman Yudho Prakoso¹, Ivan Yulivan², Susilo Adi Purwantoro³, Kasih Prihantoro⁴, Suhirwan⁵, Arifuddin Uksan⁶, Hikmat Zakky Albubaroq⁷, Rudy Sutanto⁸, Budi Pramono⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Pertahanan RI
Email: kamalekumdeplek@gmail.com

Abstrak

Lingkungan strategis global, regional dan nasional berdampak kepada ancaman faktual dan potensial yang terjadi harus diantisipasi dengan system pertahanan dan keamanan terbaik dengan melibatkan seluruh sumberdaya nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana persenjataan Angkatan laut dapat digunakan untuk mendukung fungsi dan tugas pokok dalam pertahanan negara sebagai komponen utama kekuatan maritim. Dinamika persenjataan Angkatan laut dalam pembahasan tulisan ini harus dapat memperhatikan kondisi karakteristik laut Indonesia dan juga kebutuhan dalam menindak ancaman faktual dan potensial, satu hal yang menjadi kekhususan dalam penggunaan kekuatan angkatan laut adalah fungsi diplomasi, hal ini mempengaruhi penggunaan persenjataan Angkatan laut mana kala harus keluar wilayah kedaulatan untuk mengemban fungsi diplomasi internasional, keterkaitan dengan dukungan anggaran juga menjadi penting mengingat outcome dari dukungan persenjataan ini bukan hanya kepada keberhasilan tugas pokok dan fungsi angkatan laut tetapi juga kemanfaatan terhadap ekonomi nasional bisa didapatkan dengan tata kelola yang baik. Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah, kebutuhan alutsista Angkatan laut harus memperhatikan karakteristik laut Indonesia, ancaman yang dihadapi, fungsi khusus Angkatan laut dan juga dipengaruhi oleh dukungan anggaran.

Kata Kunci: Persenjataan, Implementasi, Angkatan Laut, Diplomasi, Maritim, Anggaran

Abstract

The global, regional and national strategic environment that has an impact on factual and potential threats that occur must be anticipated with the best defense and security system by involving all national resources. One of the concerns is how naval equipment and weapons can be used to support the main functions and tasks in national defense as the main component of maritime power. The dynamics of naval equipment and weaponry in the discussion of this paper must be able to pay attention to the condition of the characteristics of the Indonesian sea and also the need to act on factual and potential threats, one thing that is special in the use of naval power is the function of diplomacy, this affects the use of naval equipment and weaponry. when it comes to leaving the sovereign territory to carry out the function of international diplomacy, the link with budgetary support is also important considering the outcome of this equipment and weapon support is not only the success of the main tasks and functions of the Navy but also benefits to the national economy can be obtained with good governance. . The conclusion of this paper is, the need for the Navy's defense equipment must pay attention to the characteristics of the Indonesian sea, the threats it faces, the special functions of the Navy and are also influenced by budgetary support.

Keywords: *Equipment and Weaponry, Implementation, Navy, Diplomacy, Maritime, Budget*

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang menimbulkan dampak yang sangat besar pada keberlangsungan kehidupan negara-negara di dunia. Kondisi darurat diberlakukan oleh seluruh negara guna menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19. Krisis ekonomi yang mengarah pada resesi menghantui kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi menurun tajam, bahkan minus dialami banyak negara di dunia (Angkasa Dipua et al, 2020). Kelangkaan pangan, energi, dan lapangan kerja, banyaknya pengangguran, serta munculnya ketakutan dan ketidakpastian, kompleksitas persoalan serta ketidakjelasan atas situasi yang berkembang mewarnai kondisi sosial dan budaya masyarakat. Eksistensi bangsa dan negara dipertaruhkan untuk menghadapi ancaman tersebut, termasuk Indonesia. Di sisi lain, perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan, konflik di Semenanjung Korea, dan konflik Tiongkok- Taiwan. Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Demikian halnya dengan perkembangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat-Iran, Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan negara seyogianya mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global (Harris et al, 2021).

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan (Jaya et al, 2020). Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang berlaku lima tahun menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara tiap-tiap tahunnya, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan pertahanan negara.

Kebijakan pertahanan negara tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2020. Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, diantaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis. Namun, seiring dengan prediksi munculnya berbagai ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, ditambahkan sasaran kebijakan untuk tahun 2021 (Lukman Yudho Prakoso et al, 2021).

Implementasi Alutsista TNI AL tidak terlepas dari kebijakan pertahanan negara yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI. Sebagai satu kesatuan system keamanan negara pada komponen utama TNI AL, bersinergi dengan kekuatan utama TNI lainnya dengan Matra Darat dan Udara. Bagaimana implementasi dinamika Alutsista TNI dalam mendukung system pertahanan negara akan dibahas dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur, cetak maupun digital lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30). Dalam metode kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai implementasi pengembangan persenjataan Angkatan laut. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang

ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Laut Indonesia

Karakteristik wilayah lautan Indonesia bisa dibedakan berdasar 4 kategori, yakni: proses terjadinya (pembentukan); letak; zona kedalaman; dan relief. Pemaparan yang lebih terang ada di bawah ini (Prinada, 2021).

1. Karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasar proses terjadinya terdiri atas 3 jenis, yakni: Laut Regresi, yaitu laut yang menyempit pada zaman Es, karena terjadi penurunan permukaan air laut. Pada zaman air surut, ada bagian dari laut yang tetap menjadi laut karena kedalamannya. Contohnya ialah lubuk laut Sulawesi dan selat makassar. Laut Transgresi, yaitu laut yang terjadi akibat genangan air laut terhadap daratan yang disebabkan kenaikan permukaan air laut sekitar 70 m pada akhir zaman Es. Contohnya adalah laut Jawa dan selat Sunda. Laut Ingresi, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut bergerak menurun, yang bisa berupa palung laut, atau lubuk laut. Contohnya laut Banda, laut Sulawesi, laut Flores, laut Maluku.
2. Karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasar letaknya: Berdasarkan letaknya, laut Indonesia tergolong laut Pedalaman, yakni laut yang diapit oleh daratan/pulau atau laut yang terletak di tengah daratan.
3. Karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasar zona kedalamannya terdiri atas 5 jenis, yakni: Zona litoral (pesisir), yaitu daerah pantai yang terletak antara garis pasang naik dan surut. Zona neritik (laut dangkal) yang punya ciri-ciri berikut: bagian dasar laut sampai kedalaman 200 Meter; Sinar matahari masih tembus ke dasar laut; jadi tempat hidup organisme laut sehingga sangat penting bagi kehidupan manusia. Contoh laut Indonesia yang termasuk zona neritik adalah landas kontinen Sunda. Zona batial (wilayah laut dalam) dengan ciri: Kedalaman antara 200 – 2000 meter dan sinar matahari sudah tidak tembus ke dasarnya. Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam) dengan ciri: Kedalaman antara 2000 – 5000 meter; tidak ada tumbuhan laut di dasarnya; tekanan air sangat besar dan suhu sangat rendah; keberadaan hewan laut sangat terbatas di bagian terdalam. Zona Hadal, yakni wilayah laut yang paling dalam dengan kedalaman di atas 5000 meter. Di antara contohnya adalah lubuk laut dan palung laut.
4. Karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasarkan reliefnya terdiri atas 2 macam, yakni: Perairan Laut Dangkal (*shelp*), dengan kedalaman 120-200 meter: Indonesia memiliki dua daerah paparan (laut dangkal). Pertama ialah Paparan Sunda (laut-laut dangkal di bagian barat Indonesia), yang di antara contohnya seperti selat Sumatra, laut Cina Selatan, selat Karimata, laut Jawa, selat Berhala. Kedua, Paparan Sahul (laut-laut dangkal di sebelah timur Indonesia), seperti laut Arafuru. Perairan laut dalam (di Indonesia tengah), yang terletak antara Paparan Sunda dan Paparan Sahul dengan topografi yang kompleks. Ciri kompleksitas itu ditandai oleh keberadaan: cekungan yang dalam dan luas (basin); daerah depresi laut yang dalam dengan bentuk memanjang (palung) lalu menyempit dengan sisi yang curam; serta palung yang agak melebar dan lebih landai. Contohnya, adalah laut di Sulawesi dan Maluku utara.

Kebutuhan Persenjataan Berdasarkan Ancaman

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional sangat kompleks dan multidimensional. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk ancaman, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ancaman aktual dan potensial, yang dikelompokkan sebagai berikut.

1. Ancaman Aktual

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain: wabah penyakit/pandemi (Covid-19), konflik Laut Cina Selatan, merosotnya pertumbuhan

ekonomi, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi mudah bergejolak (*volatility*), muncul ketidakpastian (*uncertainty*) disana-sini, kompleksitas (*complexity*) persoalan serta ketidakjelasan (*ambiguity*) atas situasi yang berkembang (Budi Pramono, 2021).

2. Ancaman Potensial

Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut diantaranya berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancamansenjata nuklir.

Implementasi Persenjataan Angkatan Laut

1. Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Dasar pertama.. UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam aturan ini menyatakan, bahwa TNI AL merupakan komponen utama pertahanan laut.

Kedua, doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Di mana fungsi TNI menjadi penangkal setiap ancaman, hambatan, dan gangguan yang mengganggu negara menjadi penindak bagi setiap serangan atau ancaman yang telah memasuki wilayah Indonesia. Serta, menjadi pemulih ketika ancaman tersebut mulai hilang dan memulihkan keadaan seperti semula.

Ketiga, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan ini menyatakan, TNI AL mempunyai tugas sebagai komponen pertahanan utama matra laut, menjaga keamanan, dan melaksanakan penegakan hukum di laut. Kemudian juga melaksanakan diplomasi maritim dan angkatan laut, melaksanakan pembangunan kekuatan TNI AL agar dapat melaksanakan tugas pokoknya, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di seluruh Indonesia (Suhirwan & Prakoso, 2019).

Keempat doktrin TNI angkatan laut Jalasveva Jayamahe yang menyatakan peran militer dalam penegakan hukum di laut serta diplomasi dan peran dukungan.

Kelima, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 82 dan universal rule. Dua aturan ini menyatakan Indonesia negara kepulauan yang tidak terpisah dengan satu kesatuan dan kaitannya dengan peran universal angkatan laut di seluruh dunia sebagai kekuatan pertahanan, kekuatan diplomasi, dan kekuatan penegakan hukum nasional di laut. (Lotulung, 2020)

Persenjataan sebagai pendukung fungsi diplomasi Angkatan Laut

Hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama. Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang tersebut. Sehingga mengacu pada Hans J. Morgenthau, politik internasional adalah pertarungan untuk kekuatan. Kekuatan politik (*political power*) dalam hubungan antar bangsa adalah hubungan bersifat psikologis antara pihak yang meng-exercise kekuatan tersebut dan pihak yang menjadi sasaran exercised tersebut. Penting untuk dipahami bahwa kekuatan politik adalah sarana (*means*) untuk mencapai tujuan (*ends*) suatu bangsa.

Dalam pertarungan untuk kekuatan, dikenal adanya kebijakan prestise. Terdapat dua cara pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu lewat praktek diplomasi dan penggunaan demonstrasi kekuatan militer. Menyangkut penggunaan demonstrasi kekuatan militer, penggunaan kekuatan Angkatan Laut untuk menunjukkan sikap politik suatu negara merupakan pilihan utama bagi banyak negara sejak berabad-abad silam. Hal ini tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki oleh kapal perang yang tidak dimiliki oleh sistem senjata lainnya, seperti mobilitas dan visibilitas.

Demonstrasi kekuatan Angkatan Laut dalam hubungan antar bangsa tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam bingkai kebijakan luar negeri. Dengan kata

lain, demonstrasi kekuatan Angkatan Laut yang lebih dikenal sebagai diplomasi Angkatan Laut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Kebijakan luar negeri sendiri bagaimanapun harus diabdikan untuk mendukung kepentingan nasional, terlebih lagi yang kepentingan nasional yang bersifat survival dan important (Kasih Prihantoro et al, 2019).

Kebijakan luar negeri ditempuh oleh para diplomat untuk kekuatan nasional pada masa damai dan strategi dan taktik militer oleh para pemimpin militer untuk kekuatan nasional pada masa perang. Dikaitkan dengan pertarungan untuk kekuatan antar bangsa, salah satu faktor yang menciptakan kekuatan bagi suatu bangsa adalah kualitas diplomasi. Kualitas diplomasi inilah yang menentukan tercapai tidaknya kepentingan nasional, sebab diplomasi merupakan salah satu unsur kekuatan nasional. Tidak sedikit kalangan yang berpendapat bahwa salah satu tujuan diplomasi adalah mempromosikan kepentingan nasional melalui sarana-sarana damai. Menurut Morgenthau, terdapat empat tugas diplomasi (Ali,2021):

1. Pertama, diplomasi harus menentukan tujuannya dikaitkan dengan kekuatan aktual dan potensial yang tersedia untuk mengejar tujuan tersebut.
2. Kedua, diplomasi harus menilai tujuan bangsa-bangsa lain dan kekuatan aktual dan potensial yang tersedia untuk mengejar kepentingan mereka.
3. Ketiga, diplomasi harus menentukan sampai sejauh mana tujuan-tujuan yang berbeda tersebut sepadan satu sama lain.
4. Keempat, diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang tepat untuk mengejar tujuan-tujuannya.

Baik diplomasi maupun kekuatan militer adalah unsur dari instrumen kekuatan nasional. Oleh karena itu, pepaduan antara kedua unsur untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasional bukan merupakan hal baru. Pendekatan seperti ini sudah ditempuh sejak lebih dari seribu tahun silam oleh berbagai negara yang pernah eksis dan tengah eksis di muka bumi.

Dalam konteks Angkatan Laut, penggunaan kekuatan Angkatan Laut dalam masa damai dan perang untuk mendukung diplomasi adalah praktek yang lumrah. Oleh karena itu, dikenal istilah populer seperti *gunboat diplomacy* (diplomasi kapal perang) dan selanjutnya muncul pula istilah *naval diplomacy* (diplomasi Angkatan Laut). Menurut James Cable, *gunboat diplomacy* adalah senjata yang digunakan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, namun kekuatannya tidak terletak pada kekuatan potensial, tetapi pada kebiasaan untuk mengaplikasikan kekuatan yang tepat (*appropriate force*) terhadap isu yang menjadi subyek perbedaan kedua belah pihak. Walaupun konstelasi geopolitik dunia kini telah berubah dibandingkan era Perang Dingin, akan tetapi praktek diplomasi Angkatan Laut melalui penggunaan kekuatan tetap ditempuh oleh berbagai negara di dunia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, diplomasi Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut berada dalam bingkai kebijakan luar negeri. Penyebaran kekuatan laut dalam hal ini kapal perang senantiasa diarahkan untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. Menurut Sir Jullian Corbett, strategi Angkatan Laut harus terkait dengan kebijakan luar negeri. Corbett sangat sadar dengan fakta bahwa perang adalah tindakan politik dan fungsi pertama dari armada Angkatan Laut adalah “untuk mendukung atau merusak upaya diplomasi”.

Oleh karena itu, benang merah antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan merupakan suatu keharusan yang mutlak. Mengacu pada praktek dan pengalaman di negara-negara maju, benang merah tersebut dapat tercipta karena adanya strategi keamanan nasional. Dengan kata lain, diplomasi Angkatan Laut dituntun oleh strategi keamanan nasional.

Karena penggunaan kapal perang dalam rangka melaksanakan diplomasi Angkatan Laut berada dalam bingkai politik, penting untuk dipahami bahwa diplomasi Angkatan Laut adalah penyebaran kekuatan Angkatan Laut secara terbatas untuk mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terkait dengan hal itu, dalam diplomasi Angkatan Laut terdapat empat hal yang harus senantiasa diperhatikan. Yakni *definitive force*, *purposeful force*, *catalytic force* dan *expressive force*.

Mengapa keempat hal tersebut harus diperhatikan? Dalam diplomasi Angkatan Laut, terdapat unsur suasi (*suasion*). Mengacu pada Edward N. Luttwak, suasi Angkatan Laut terdiri dari *latent naval suasion* dan *active naval suasion*. *Latent naval suasion* mempunyai dua turunan yaitu *deterrent mode* dan *supportive mode*, adapun *active naval suasion* terdiri dari *supportive* dan *coercive*. Unsur *coercive* menurut Luttwak terdiri dari dua dimensi yaitu positif (*compellence*) dan negatif (*deterrence*).

Suasi merupakan unsur penting dalam diplomasi Angkatan Laut, sebab suasi mendefinisikan semua reaksi, baik secara politik atau taktis, yang ditimbulkan oleh semua pihak terhadap eksistensi, pameran, manipulasi atau penggunaan simbolis instrumen kekuatan militer, terlepas dari apakah reaksi merefleksikan niat yang disengaja atau tidak oleh pihak yang melaksanakan penyebaran kekuatan. Suasilaten muncul sebagai reaksi terhadap penyebaran kekuatan Angkatan Laut secara rutin tanpa suatu sasaran yang spesifik. Adapun suasi aktif adalah reaksi yang timbul dari penyebaran kekuatan laut dengan sasaran yang spesifik.

Definitive force harus ada dan nampak dalam diplomasi Angkatan Laut karena kekuatan itulah yang diharapkan mampu menciptakan *faith accompli* terhadap pihak yang menjadi sasaran diplomasi Angkatan Laut. Seberapa besar *definitive force* sebenarnya bersifat relatif, akan tetapi penting untuk dipahami kembali bahwa diplomasi Angkatan Laut adalah penggunaan kekuatan Angkatan Laut secara terbatas. Yang utama adalah kemampuan *definitive force* untuk menimbulkan unsur suasi.

Purposeful force yaitu diplomasi Angkatan Laut melalui penyebaran kapal perang memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum diplomasi Angkatan Laut digelar untuk mengubah kebijakan atau karakter kebijakan luar negeri pemerintahan asing yang menjadi sasaran. Di sini ditekankan pentingnya perumusan tujuan dari penyebaran kapal perang dalam diplomasi Angkatan Laut, sebab tanpa tujuan yang jelas maka penyebaran itu cenderung tidak punya makna apa-apa. Tujuan yang jelas akan membantu menciptakan unsur suasi, baik suasilaten maupun suasi aktif.

Catalytic force yakni sifat diplomasi Angkatan Laut di mana kekuatan yang dilibatkan yaitu kapal perang memiliki sifat katalis yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Sebagai ilustrasi, dalam penyebaran kapal perang guna melaksanakan diplomasi Angkatan Laut terdapat karakter fleksibel kapal perang, misalnya berada di perairan internasional yang berdekatan dengan perairan teritorial negara sasaran. Apabila dibutuhkan, kapal perang tersebut dalam segera melakukan intervensi (apapun bentuk intervensinya) terhadap negara sasaran dengan memasuki perairan teritorial negara tersebut secepatnya dan sesegera mungkin kembali ke perairan internasional setelah intervensi itu dilaksanakan. Inilah yang dimaksud sifat katalis dalam diplomasi Angkatan Laut dan karakter ini tidak dimiliki oleh sistem senjata lainnya.

Expressive force adalah karakter kekuatan kapal perang yang melaksanakan diplomasi Angkatan Laut, yang mana kapal perang itu digunakan untuk menekankan sikap-sikap dari negara yang bersangkutan. Karakter itu terbentang dari yang bersifat lunak sampai keras, seperti sekedar pameran hingga ancaman penggunaan kekuatan. Dalam *expressive force*, sangat jelas mengandung unsur suasi seperti yang telah dikemukakan oleh Luttwak.

Hal penting berikutnya yang tidak boleh luput dari perhatian dalam diplomasi Angkatan Laut adalah kapabilitas, kredibilitas, komitmen dan komunikasi. Keempat unsur tersebut memiliki keterkaitan erat dengan unsur suasi, yang mana unsur suasi akan muncul apabila didukung oleh keempat persyaratan. Dengan kata lain, dalam praktek di lapangan kekuatan kapal perang yang disebarkan harus berupa *capital ship* yang dimiliki Angkatan Laut. Tidak semua jenis kapal perang mampu menimbulkan unsur suasi.

Implementasi anggaran pertahanan dalam mendukung Alutsista

Pertahanan negara dapat dianggap sebagai sebuah sistem. Inputnya terdiri atas TNI dan rakyat (*man*), Alutsista dan teknologi (*machine dan material*), anggaran (*money*), strategi (*method*), informasi dan energi. Sedangkan *output system* adalah rasa aman, keselamatan seluruh bangsa, keamanan segala sumber daya serta kedaulatan wilayah

NKRI. *Outcome*-nya adalah kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Faktor utama tercapainya output dan outcome di atas sangat tergantung dari kualitas dan profesionalitas TNI serta tersedianya Alpalhan yang sesuai dan berkualitas. Alpalhan merupakan alat peralatan pertahanan melingkupi matra darat, laut dan udara. Saat ini anggaran alpalhan menjadi berita yang viral. Berdasarkan draft Perpres yang beredar, perencanaan kebutuhan (Renbut) alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari KEMENHAN untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar (setara dengan Rp 1.760 triliun). (Arungpadang, 2021)

Outcome yang diharapkan adalah efek bola salju terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Diperlukan kesadaran segenap komponen bangsa terhadap arti pentingnya anggaran pertahanan negara serta tersedianya Alpalhan yang memadai. Besaran anggaran pertahanan tidak semata-mata hanya dikaitkan dengan potensi ancaman perang saja. Postur TNI yang berkualitas, profesional dan disegani tidak hanya berguna pada perang (fungsi penindakan) saja, namun pasti akan berdampak langsung terhadap posisi tawar dan kedudukan diplomatik NKRI pada percaturan politik global.

SIMPULAN

Implementasi pengembangan persenjataan Angkatan laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai komponen utama kekuatan maritim, harus dapat memperhatikan karakteristik laut Indonesia dan juga tepat dalam penggunaan dalam menghadapi ancaman faktual dan potensial. Fungsi khusus Angkatan laut dalam mengemban fungsi diplomasi menempatkan persenjataan Angkatan laut harus dapat setiap saat digerakkan tidak saja di wilayah teritorial tetapi juga dapat bergerak ke wilayah internasional yang membutuhkan. Permasalahan anggaran masih menjadi kendala untuk mendapatkan outcome yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. H. (2021, Oktober 7). *ANALISA DAN KAJIAN (STUDY AND ANALYSIS)*. Retrieved from Forum Kajian Pertahanan Maritim: <https://www.fkpmar.org/menata-ulang-diplomasi-angkatan-laut-di-indonesia/>
- Arungpadang, T. A. (2021, July 5). *News*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/05/07212731/alpalhan-dan-anggaran-pertahanan-dalam-sistem-pertahanan-negara?page=all>
- Cable, James, *Gunboat Diplomacy 1919-1979: Political Application of Limited Naval Force*, New York: St. Martin Press, 1981, hal.57
- Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., Prakoso, L. Y., Hermawan, R., Puspitawati, D., Harahap, N., & Rizanny, D. (2020). AN ANALYSIS OF THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT: INDONESIA'S PERSPECTIVES, CONTEXTS AND RECOMMENDATIONS. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990.
- Doktrin TNI angkatan laut Jalasveva Jayamahe
Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- Jaya, A. D., Prakoso, L. Y., & Suhirwan, S. (2020). PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI SELAT SINGAPURA TERHADAP PENINGKATAN PEMBAJAKAN, KONSISTENSI KEBIJAKAN PUBLIK, DAN KONSESI WILAYAH NEGARA LITORAL. *Strategi Pertahanan Laut*, 4(1).
- Kasih Prihantoro, Arif Darmawan, Zakariya ., Lukman Yudho Prakoso, & Kasih Prihantoro Zakariya ., Lukman Yudho Prakoso, A. D. (2019). Implementation Study of Public Policies, Synergy of Policy for Defense Area and National Area Spatial in

- Grati Pasuruan. *Public Policy and Administration Research*, 9(Public Policy and Administration Research), 33–39. <https://doi.org/10.7176/PPAR/9-11-04>
- Lotulung, G. (2020, september 22). *news Nasional*. Retrieved from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/07120731/ini-peran-dan-tugas-tni-al-dalam-mewujudkan-gagasan-poros-maritim-dunia?page=all>
- Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Asep Iwa Soemantri- Editor: Budi Pramono, R. (2021). *Bahan Ajar Kebijakan Pertahanan Laut* (R. Budi Pramono (Ed.); 1st ed.). Unhan Press.
- Luttwak, Edward N, *The Political Uses of Sea Power*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1974, hal.7
- Morgenthau, Hans J, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1973, hal.29
- Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *Italienisch*, 11(italienisch), 271–275.
- Prinada, Y. (2021, Agustus 04). *Pendidikan*. Retrieved from tirtoid: <https://tirtoid.id/apa-saja-karakteristik-wilayah-indonesia-lautan-perairan-daratan-gil1>
- Suhirwan LY, P., Suhirwan, & Prakoso, L. Y. (2019). Defense strategy at sea handling of Transnational Organized Crime (TNOG) in Nunukan Indonesia's national sea border. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 339(1), 12043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/339/1/012043>
- Till, Geoffrey, *Seapower: A Guide for the Twenty First Century*, London, Frank Cass, hal.47
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 82
- UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara